

KODE ETIK		
2024		
PERBUB KAB.NGANJUK NO.41, BD 2024/NO.41, 53 HLM		
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK		
ABSTRAK	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
	-	Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur meliputi tentang SOP Satpol PP, Kode Etik Pol PP, pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) dan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP, penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, Sanksi terkait pelanggaran Kode Etik, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN	: -	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024; - Lampiran sebanyak 37 hlm.